



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan sesuai tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah serta Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Laporan ini menjelaskan upaya mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program/kegiatan Badan Keuangan Daerah Tahun 2024. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh Tahun 2024 berorientasi pada pencapaian tugas dan fungsi. Keberhasilan pada tahun 2023 dijadikan tolok ukur untuk meningkatkan kinerja Badan Keuangan Daerah pada Tahun 2024.


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kewajiban dan kebutuhan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Karanganyar dengan prinsip *Good governance* dan *Clean governance* serta sebagai manifestasi pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat, yang memuat tentang keberhasilan maupun hambatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Lebih

jauh Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya *Good governance*.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di tahun mendatang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bermanfaat sebagai bahan masukan dan acuan dalam pengambilan keputusan.

Karanganyar, 13 Februari 2025
Plh. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



PUJIYANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197105151990031002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Landasan Hukum	2
C. Isu Strategis	13
D. Susunan Organisasi	14
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II RENCANA STRATEGIK dan RENCANA KERJA	21
A. Rencana Strategik.....	21
B. Visi dan Misi.....	21
C. Tujuan dan Sasaran	23
D. Rencana Kinerja Tahun 2024.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	41
A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.....	41
B. Analisis Capaian Kinerja.....	43
C. Realisasi Anggaran.....	52
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Permasalahan dan Solusi.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024	11
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024	11
Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.....	12
Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.....	13
Tabel 1.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.....	13
Tabel 1.6 Rekapitulasi Sarana Prasarana.....	14
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	21
Tabel 2.1.1 Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar (Renstra Tahun 2024 s.d. 2026).....	23
Tabel 2.2 Rencana Program, Indikator Kinerja dan Target Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.....	24
Tabel 2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan target Renstra	27
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Keuangan Daerah Tahun 2024	28
Tabel 2.5 Anggaran Penetapan dan Perubahan Tahun 2024	29
Tabel 3.1 Pengukuran Skala Ordinal	41
Tabel 3.2. Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024	43
Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan target Renstra.....	44
Tabel 3.4. Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Nasional.....	45
Tabel 3.5. Target Capaian Sasaran Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMD	45
Tabel 3.6. Analisis penyebab keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Tahun 2024	46
Tabel 3.7 Laporan Realisasi Kinerja Badan Keuangan Daerah Per 31 Desember 2024	48

Tabel 3.8 Ringkasan Capaian Anggaran Sasaran 1	53
Tabel 3.9 Ringkasan Capaian Anggaran Sasaran 2	53
Tabel 3.10 Ringkasan Capaian Anggaran Sasaran 3.....	54
Tabel 3.11. Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Dengan Tahun Sebelumnya.....	54
Tabel 3.12 Laporan Realisasi Anggaran Badan Keuangan Daerah Per 31 Desember 2024.....	54

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026;
- B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026;
- C. Pohon Kinerja Tahun 2025-2029;
- D. Cascading Tahun 2024-2026;
- E. Rencana Aksi Perangda Tahun 2024;
- F. Pengukuran Kinerja Tahun 2024;
- G. Perjanjian Kinerja (PK) eselon II sampai dengan eselon IV Tahun 2024,
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun
2025
- H. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024;
- I. Laporan Realisasi Kinerja Tahun 2024.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satu nya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kewajiban dan kebutuhan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Karanganyar dengan prinsip *Good governance* dan *Clean governance* serta sebagai manifestasi pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat, yang memuat tentang keberhasilan maupun hambatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Lebih jauh Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya *Good governance*.

1.2 Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah dibentuk Badan Keuangan Daerah yang mempunyai fungsi penunjang bidang keuangan dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Badan Keuangan Daerah masih dihadapkan pada berbagai permasalahan (a) Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, (b) Subyek pajak tidak menyampaikan secara jujur kondisi obyek pajak yang sebenarnya, (c) Regulasi keuangan yang sering berubah.

Beberapa isu pokok yang akan mempengaruhi pelaksanaan di Bidang Pendapatan Daerah, antara lain : (a) masyarakat belum sepenuhnya memahami arti pentingnya pembayaran pajak untuk pembangunan daerah; (b) kesadaran dan kejujuran wajib pajak sangat kurang; (c) Adanya penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang melandasi kegiatan.

Sasaran yang akan dicapai adalah (a)meningkatnya kualitas profesionalisme, wawasan dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang sesuai tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) meningkatnya kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung administrasi kantor dan pelayanan umum; (c) mewujudkan optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan daerah; (d) pembayaran pajak daerah tepat waktu sistem jemput bola; (e) pelayanan pengajuan keberatan dan pemeriksaan pajak PBB/BPHTB; (f) meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang; (g) Realisasi belanja daerah dan penerimaan daerah sesuai jadwal; (h) penyediaan informasi dan laporan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah tepat waktu;(i) meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan aset daerah yang berorientasi pada kepentingan pemerintahan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi:

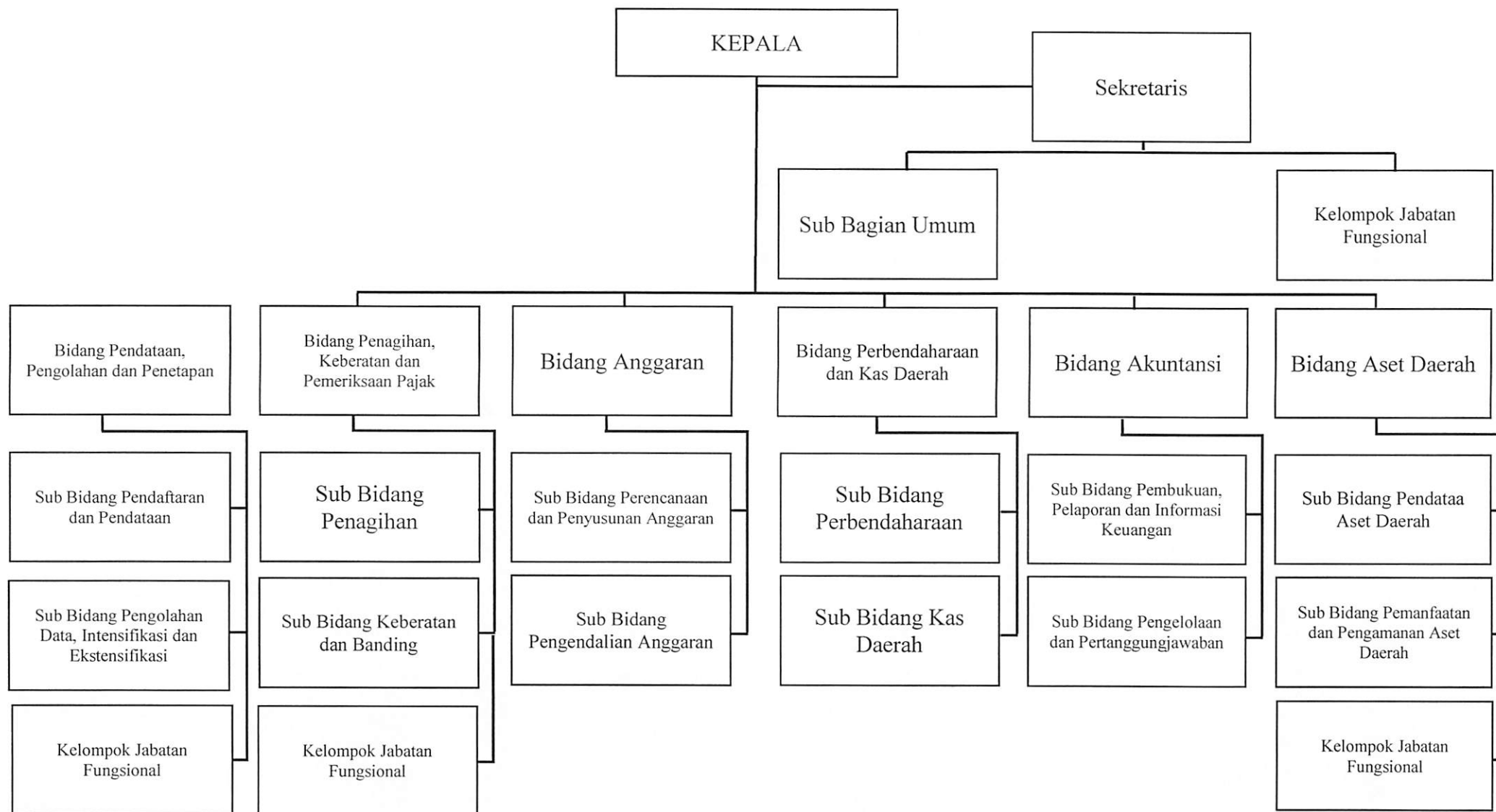
1. Menyusun kebijakan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta kesekretariatan;
2. Mengkoordinasikan fasilitas dan pembinaan kegiatan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, aset daerah dan kesekretariatan;
3. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, aset daerah dan kesekretariatan.

Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Pendataan Pengolahan dan Penetapan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan.;

2. Sub Bidang Penetapan
- d. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penagihan;
 2. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak.
- e. Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
 2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
- f. Bidang Perbendaharaan dan Kas, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
 2. Sub Bidang Kas Daerah.
- g. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Informasi Keuangan;
 2. Sub Bidang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan.
- h. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pendataan Aset Daerah;
 2. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar



Sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar terdiri dari :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan Daerah;
- b. Pelaksana kebijakan teknis bidang keuangan Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksana tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan Daerah;
- e. Pelaksana fungsi kesekretariatan Badan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan, dan melakukan perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelaksana administrasi.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penata organisasi dan tata laksana;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksana advokasi hukum;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- g. Penyelenggaraan pengelola barang milik daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, ketatalaksanaan, keorganisasian, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi BKD.

3. Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan

Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan merupakan pelaksana unsur penunjang di bidang pendataan, pengolahan dan penetapan pendapatan. Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan di bidang pendataan, pengelolaan dan penetapan pendapatan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksana kebijakan teknis bidang pendaftaran, pendataan, pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi dan penetapan pendapatan;
- b. Pelaksana program kerja bidang pendaftaran, pendataan pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi, dan penetapan pendapatan;
- c. Pengelola program kerja bidang pendaftaran, pendataan pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi, dan penetapan pendapatan;

- d. Pemantauan dan pengendalian di bidang pendaftaran, pendataan pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi, dan penetapan pendapatan;
- e. Pelaksana tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1 Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pendataan pendapatan.

3.2 Kepala Sub Bidang Penetapan

Kepala Sub Bidang Penetapan sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksana kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan pendapatan daerah.

4. Kepala Bidang Penagihan, Keberatan Dan Pemeriksaan Pajak

Kepala Bidang Penagihan, Keberatan Dan Pemeriksaan merupakan unsur penunjang di bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak. Kepala Bidang Penagihan, Keberatan Dan Pemeriksaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Penagihan, Keberatan Dan Pemeriksaan mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksana kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan keberatan dan pemeriksaan pajak.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Penagihan, Keberatan Dan Pemeriksaan, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksana kebijakan teknis bidang penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak;
- b. Pelaksana program kerja bidang penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak;
- c. Pengelola program kerja bidang penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak;
- d. Pengkoordinasi penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak;

- e. Pemantauan dan pengendalian bidang penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak; dan
- f. Pelaksana tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1 Kepala Sub Bidang Penagihan

Kepala Sub Penagihan sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan pajak.

4.2 Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak

Kepala Sub Bidang Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pemeriksaan pajak.

5. Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran merupakan pelaksana unsur penunjang bidang anggaran. Kepala Bidang Anggaran berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Anggaran sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksana kebijakan teknis perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan daerah;
- b. Penyusun program kerja perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan daerah;
- c. Pengelolaan program kerja perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan daerah;
- d. Pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan daerah;
- e. Pemantauan dan pengendalian perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan daerah;
- f. Pelaksana tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.1 Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran sebagaimana yang dimaksud melakukan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksana kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran.

5.2 Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran

Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran sebagaimana yang dimaksud melakukan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksana kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian anggaran.

6. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah merupakan unsur penunjang bidang perbendaharaan dan kas daerah. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas perencanaan, perumusan dan pelaksana kebijakan, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan bidang perbendaharaan dan kas daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksana kebijakan teknis perbendaharaan dan kas keuangan daerah;
- b. Penyusun program kerja perbendaharaan dan kas keuangan daerah;
- c. Pengelola program kerja perbendaharaan dan kas keuangan daerah;
- d. Pengkoordinasi perbendaharaan dan kas keuangan daerah;
- e. Pemantauan dan pengendali perbendaharaan dan kas keuangan daerah;
- f. Pelaksana tugas lain sesuai dengan fungsinya.

6.1 Kepala Sub Bidang Perbendaharaan

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas persiapan bahan perencanaan

perumusab dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan pengelolaan keuangan.

6.2 Kepala Sub Bidang Kas Daerah

Kepala Sub Bidang Kas Daerah sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusab dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan kas daerah.

7. Kepala Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi merupakan unsur penunjang bidang pengelolaan akuntansi keuangan. Kepala Bidang Akuntansi dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Akuntansi sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas perencanaan, perumusan dan pelaksana kebijakan, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan akuntansi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksana kebijakan teknis pengelola akuntansi keuangan;
- b. Penyusun program kerja pengelola akuntansi keuangan;
- c. Pengelola program kerja pengelola akuntansi keuangan;
- d. Pengkoordinasi pengelola akuntansi keuangan;
- e. Pemantauan dan pengendali pengelola akuntansi keuangan;
- f. Pelaksana tugas lainsesuai dengan fungsinya.

7.1 Kepala Sub Bidang Pembukuan

Kepala Sub Bidang Pembukuan sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusab dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembukuan keuangan.

7.2 Kepala Sub Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusab dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

8. Kepala Bidang Aset Daerah

Kepala Bidang Aset Daerah merupakan unsur penunjang di bidang pengelolaan aset daerah. Kepala Bidang Aset Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksana kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Aset Daerah, mempunyai fungsi :

- a. Penyusun program kerja bidang pengelolaan aset daerah;
- b. Pelaksana kebijakan teknis bidang pengelolaan aset daerah;
- c. Pengkoordinasi perencanaan pengelolaan aset daerah;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan aset daerah; dan
- e. Pelaksana tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8.1 Kepala Sub Bidang Pendataan Aset Daerah

Kepala Sub Pendataan Aset Daerah sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan aset daerah.

8.2 Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah

Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah.

Adapun Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil/CPNS

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024

Golongan	P N S	C P N S	Jumlah
IV	19	-	19
III	37	-	37
II	8	-	8
I	1	-	1
Jumlah		-	65

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024

No	Ijazah/Pendidikan	Jumlah
1	S.3 (Doktor)	-
2	S.2 (Pasca Sarjana)	30
3	S.1 (Sarjana)	20
4	D.3 / Sarjana Muda	4
5	SLTA / SMU / SMK	10
6	SMP	-
7	SD	1
	Jumlah	65

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

Tabel 1.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan
Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024

Golongan	P N S	C P N S	Jumlah
IV/d (Pembina Utama Madya)	0	-	0
IV/c (Pembina Utama Muda)	1		1
IV/b (Pembina Tingkat I)	1		1
IV/a (Pembina)	17		17
III/d (Penata Tingkat I)	15		15
III/c (Penata)	6		6
III/b (Penata Muda Tingkat I)	13		13
III/a (Penata Muda)	3		3
II/d (Pengatur Tingkat I)	7		7
II/c (Pengatur)	1		1
II/b Pengatur Muda Tingkat I)	0		0
II/a (Pengatur Muda)	0		0
I/d (Juru Tingkat I)	0		0
I/c (Juru)	1		1
I/b (Juru Muda Tingkat I)	0		0
I/a (Juru Muda)	0		0
Jumlah	65		65

4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

Tabel 1.4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural
Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024

GOLONGAN	ESELON				JUMLAH
	IIb	IIIa	IIIb	IVa	
IV/d					
IV/c	1				1
IV/b		1			1
IV/a			6	7	13
III/d				4	4
III/c				2	2
III/b					
III/a					
Jumlah	1	1	6	13	21

5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

Tabel 1.5.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional
Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024

GOLONGAN	JUMLAH
IV/c	
IV/b	
IV/a	4
III/d	11
III/c	4
III/b	13

III/a	3
II/d	7
II/c	1
II/b	
II/a	
I/d	
I/c	1
I/b	
I/a	0
Jumlah	65

Tabel 1. 6
Rekapitulasi Sarana Prasarana

No	Nama	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	AC Unit	51		51
2	AC Split	18		18
3	Acces Point	12		12
4	Alat Kantor Lainnya	4		4
5	Alat Komunikasi Sosial Lainnya	11		11
6	Alat Pembersih lainnya	4		4
7	Alat Komunikasi Telp Lainnya	1		1
8	Alat Pemadam Lainnya	1		1
9	Alat Pemadam Portable	2		2
10	Alat Penghancur Kertas	7		7
11	Alat Penyimpanan Lainnya	3		3
12	Alat Rumah Tangga Lainnya	12		12
13	Alat Ukur Lainnya	4		4
14	Almari Besi/Metal	53		53
15	Amplifier	1		1
16	Bangku Tunggu	20		20
17	Brandkas	5		5
18	Camera Film	2		2
19	Camera Video	1		1
20	Camera+Attachment	12		12
21	Card Wirelaess LAN	1		1
22	Cassete Recorder	2		2

23	Daun Pintu Alminium	1	1
24	Daun Pintu Alminium	1	1
25	Disk Pack	1	1
26	Dispay	2	2
27	Dispencer	9	9
28	Exhauster Fan	3	3
29	External	1	1
30	Facsimile	1	1
31	Filling Besi/Metal	37	37
32	Gergaji	2	2
33	Gerobak Dorong	8	8
34	Global Postioning System	6	6
35	Handy Cam	4	4
36	Harddisk	15	15
37	Hiasan Dinding	45	45
38	Internet	1	1
39	Hub.	8	8
40	Jam Elecktronik	9	9
41	Karpet	4	4
42	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	3	3
43	Keyboard	127	127
44	Kipas Angin	3	3
45	Kompor Gas	1	1
46	Kitchen Set	1	1
47	Korden	1	1
48	Komputer Unit /Jaringan Lainnya	1	1
49	Kursi Besi / Metal	109	109
50	Kursi biasa	177	177
51	Kursi Kayu / Rotan	6	6
52	Kursi Kerja Pejabat	28	28
53	Kursi Putar	19	19
54	Kursi Rapat	56	56
55	Kursi Rapat Pejabat	7	7
56	Kursi Tamu	25	25
57	Lap Top	30	30
58	Lemari & arsip Pejabat Lainnya	4	4
59	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	8	8
60	Lemari Buku untuk Perpustakaan	3	3
61	Lemari Es	2	2
62	Lemari Kaca	6	6
63	Lemari Kayu	26	26
64	Loudspeker	3	3
65	Lensa Kamera	3	3

66	M.Penghisap Debu	4		4
67	M.Potong Rumput	1		1
68	Mainframe	1		1
69	Megaphone	4		4
70	Meja 1/2 Biro	9		9
71	Meja Kayu /Rotan	22		22
72	Meja Kerja Pejabat	30		30
73	Meja Kerja Pejabat Eselon Ii	1		1
74	Meja Kerja Pejabat Eselon Iii	4		4
75	Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	13		13
76	Meja Panjang	4		4
77	Meja Komputer	15		15
78	Meja Rapat	71		71
79	Meja Resepsionis	1		1
80	Meja Tambahan	4	5	9
81	Meja Telepon	5		5
82	Meja Tulis	0		0
83	Mesin Absensi	2		2
84	Mesin Cuci	1		1
85	Mesin Foto Copy Uk.Folio	1		1
86	Mesin Foto Copy K.Biasa	1		1
87	Mesin Hitung Manual		6	6
88	Mesin Kalkulator	3		3
89	Mesin Tik Man (11-13)	1		1
90	Mesin Tik Listrik Standrt	1		1
91	Mesin Tik Lainnya	2		2
92	Meubelair Lainnya	4		4
93	Microphone	34		34
94	Mimbar / Podium	1		1
95	Mini Komputer	6		6
96	Modem	5		5
97	Note Book	18		18
98	Monitor	8		8
99	Overhead Projector	0		0
100	P.C. Unit	127		127
101	Papan Nama Instansi	1		1
102	Peralatan Mini komputer Lainnya	4		4
103	Peralatan Jaringan Lainnya	1		1
104	Peralatan Personal Komp. Lainnya	20		20
105	Peralatan Studio Visual	10		10
106	Perkakas Kantor	2		2
107	Perforator Besar	1		1
108	Pick Up	1		1
109	Personal Komputer Lainnya	9		9

110	Pompa Air	1		1
111	Plotter	1		1
112	Portable Generating Set	1		1
113	Printer	131		131
114	Proyektor+Attachment	8		8
115	Rak Besi / Metal	41		41
116	Rotary Filling	2		2
117	Rak TV	1		1
118	Scanner	10		10
119	Senter	0		0
120	Sepeda Motor	54		54
121	Sepeda Motor Gerobak	0		0
122	Server	6		6
123	Sketsel / Penyekat	1		1
124	Software	2		2
125	Sound System	2		2
126	Speaker	3		3
127	Station Wagon	16		16
128	Stabilizer	1		1
129	Televisi	24		24
130	Tangga Almunium	2		2
131	Tustel	1		1
132	Timbangan Barang		1	1
133	Ware Less	1		1
134	Unit Power Supply	46		46

1.3 ISU STRATEGIS

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan keuangan Daerah kabupaten karanganyar tahun 2024-2026, permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka isu-isu strategis yang dihadapi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Kemampuan Keuangan Daerah

Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah menjadi isu strategis karena berdampak pada kemampuan penyelenggaraan pelayanan umum. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah.

2. Isu Kualitas Pelayanan Publik

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan meningkatnya partisipasi kelompok aktifis masyarakat di era

keterbukaan informasi semakin tinggi. Berkembangnya sistem monitoring berbasis komunitas dan maraknya jurnalisme warga meningkatkan tuntutan atas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, terjangkau, tepat guna, berkualitas, dan inklusif.

1.3 LANDASAN HUKUM

Landasan yuridish penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kab. Karanganyar Tahun 2021 No. 6, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Karanganyar No. 129);
8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 16, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 114);

10. Peraturan Bupati Karanganyar No 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar No 64 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Bupati Karanganyar No 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar;

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan LKjIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Strategis

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- 2) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

- 3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- 6) Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

C. BAB IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Lampiran :

Pada lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan data lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026 adalah sebuah dokumen perencanaan tiga tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2024 - 2026.

Badan Keuangan Daerah yang merupakan unit kerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karanganyar, oleh karena itu Renstra Badan Keuangan Daerah menjadi satu kesatuan dalam Renstra Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang memuat tujuan, sasaran, strategi atau cara mencapai tujuan/sasaran, kebijakan, program serta kegiatan.

Dalam rangka mencapai hasil yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2024	2025	2026
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	73	75	77
		Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP

		BMD				
		Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	51 %	51%	52%

Selain hal yang terkait dengan peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah, hal lain yang perlu diperhatikan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah, yakni peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana disebutkan dalam RPJMD. Kebijakan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Karanganyar:

a. Intensifikasi PAD, melalui:

- 1) Optimalisasi sistem pajak *on line* dengan menambahkan peralatan berupa *tapping box* (alat perekam transaksi) untuk meminimalisi penyimpangan data transaksi oleh wajib pajak daerah.
- 2) Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemeriksaan terhadap laporan keuangan wajib pajak daerah. Sehingga apabila ditemukan kekurangan bayar pajak daerah akan segera dikeluarkan OPD kurang bayar kepada wajib pajak.
- 3) Penegakkan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayarannya.
- 4) Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) pajak daerah (fiskus) melalui diklat pajak daerah, yaitu lanjutan diklat audit pajak dan pemeriksaan pajak maupun diklat yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas SDM perpajakan.
- 5) Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan kepada wajib pajak daerah.
- 6) Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah *out of date* menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
- 7) Peningkatan koordinasi dengan OPD penghasil lain dan BUMD untuk optimalisasi pendapatan daerah.
- 8) Penilaian kembali atas tanah dan bangunan dalam rangka optimalisasi penerimaan dari PBB perdesaan dan perkotaan.

- 9) Verifikasi dan penyelesaian terhadap piutang PBB yang masih ada tunggakan.
- b. Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi, melalui:
- 1) Perubahan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian daerah dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 2) Perluasan subjek dan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (perluasan tax based) berdasarkan potensi yang sudah dihitung.
 - 3) Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kawasan-kawasan tertentu secara bertahap, dengan cara menggunakan Peta Zona Nilai Tanah tahun terbaru sebagai pedoman untuk perhitungan Nilai Pasar dan Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan.

2.1.1 Tujuan dan sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Perangkat Daerah selama 3 (tiga) tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.1
Tujuan dan Sasaran
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar
(Renstra Tahun 2024 s.d. 2026)

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks	72	73	75
			Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	73	75	77

			Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan BMD	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
			Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	Persentase	51	51	52

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dalam menunjang kelangsungan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Karanganyar dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Karanganyar serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat juga berusaha mensukseskan Tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2024 s.d. 2026 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Daerah”. Sasaran strategis dan prioritas penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah.

Untuk lebih lengkapnya rumusan tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Rencana Program, Indikator Kinerja dan Target
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024

Tujuan Daerah	: Meningkatkan Daya Saing Daerah		
Indikator	: Indeks Daya Saing Daerah		
Sasaran	: Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi		
Indikator	: Indeks Reformasi Birokrasi		
Tujuan OPD	: Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi		
URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024
Sasaran 1		Nilai SAKIP OPD	73
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100 %

Sasaran 2		Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase ketepatan APBD, presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah dan presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku	100 %
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase OPD yang rekonsiliasi tepat waktu	100 %
Sasaran 3		Rasio PAD Daerah terhadap PAD	51 %
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	51 %

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014 Perjanjian Kinerja merupakan lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja melalui Perjanjian Kinerja ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi, wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan pimpinan OPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan OPD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja harus disusun setelah OPD menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Untuk Pemerintah Daerah sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan *outcome* yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan indikator kinerja lainnya yang relevan. Sedangkan Tingkat Eselon II dan Eselon III sasaran yang digunakan menggambarkan *outcome* dan *output* pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama OPD dan Indikator Kinerja lain yang relevan.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 adalah tersebut juga merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk indikator kinerja yang ada pada tingkat tujuan dan atau sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama, yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2024

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	4	5
1	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	72
	Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	73
	Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan BMD	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP
	Sasaran 1 : Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	51

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 90.286.688.621	APBD
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 370.401.546.094	APBD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.846.126.120	APBD
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 6.287.545.407	APBD

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Keuangan Daerah Tahun 2024

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	4	5
1	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	72
	Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	73
	Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan BMD	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP

Sasaran 1 : Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	51
--	------------------------------------	----

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 90.286.688.621	APBD
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 370.401.546.094	APBD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.846.126.120	APBD
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 6.287.545.407	APBD

2.4 RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana anggaran dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Rencana Anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Anggaran Penetapan dan Perubahan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA	
				Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			451.223.002.057		481.420.577.670
		KEUANGAN					
1	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	64.274.312.556	100%	76.364.117.355
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100%	284.876.600	100%	349.844.400
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	134.876.600	11 Dokumen	173.321.100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	176.523.300
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100%	26.326.086.618	100%	31.307.475.817

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	26.296.086.618	68 Orang/bulan	31.277.475.817
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	165.975.750	100%	37.893.750
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	136 Orang	165.975.750	136 Orang	37.893.750
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.283.782.700	100%	2.976.767.700
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	380.276.000	10 Paket	773.746.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	399.900.000	24 Paket	424.900.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	967.955.000	120 Laporan	1.224.820.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21796	129.961.700	21796	137.761.700

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	405.690.000	10 Dokumen	415.540.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	277.265.000	100%	680.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	277.265.000	2 Unit	680.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	33.673.756.138	100%	39.587.427.588
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	219.414.700	12 Laporan	259.462.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32.192.120.000	12 Laporan	37.508.277.500
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.111.953	12 Laporan	100.111.953
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.162.109.485	12 Laporan	1.719.576.135

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan daerah	100%	1.262.569.750	100%	1.424.708.100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	78 Unit	336.704.000	78 Unit	427.224.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	413 Unit	587.865.750	413 Unit	659.484.100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	198.000.000	1 Unit	198.000.000
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	12 Unit	40.000.000	12 Unit	40.000.000
2	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan BMD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Presentase ketepatan APBD, presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah dan presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku	100%	380.371.717.874	100%	397.665.145.188

2	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Presentase ketepatan APBD	100%	1.232.406.775	100%	1.370.518.775
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	5 Dokumen	169.452.450	5 Dokumen	147.442.500
	Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	135.456.450	4 Dokumen	102.959.000
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	42 OPD	18.917.750	42 OPD	18.917.600
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	42 OPD	19.811.450	42 OPD	19.811.450
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3 Dokumen	184.737.350	3 Dokumen	233.597.900
	Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Dokumen	183.930.600	3 Dokumen	253.953.600
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	65.759.600	2 Dokumen	78.864.600
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Dokumen	454.341.125	4 Dokumen	514.972.125

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku	100%	1.144.343.800	100%	1.301.423.800
Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	84 Dokumen	95.208.300	84 Dokumen	95.205.800
Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan transfer lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	6.576.050	12 Dokumen	6.584.000
Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non-tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen	7.118.000	12 Dokumen	7.118.000

Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kasda laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	616.404.000	12 Laporan	724.112.000
Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	4 Dokumen	4.956.000	4 Dokumen	5.068.000
Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12	160.000.000	12	160.000.000

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	9.113.000	1 Dokumen	19.589.000
Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	244.968.450	100 Orang	283.747.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah	100%	1.200.079.119	100%	1.323.899.119
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	22 Dokumen	53.405.400	22 Dokumen	66.284.400
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Dokumen	8.669.000	18 Dokumen	8.669.000

Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6 Dokumen	596.752.450	6 Dokumen	679.519.250
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	6.433.500	1 Dokumen	6.433.500
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	57.976.319	1 Dokumen	5.125.069
Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemda	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	18.884.550	1 Dokumen	3.850.000
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	90 Orang	457.957.900	90 Orang	554.017.900
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertib dan Akuntabel	1 Tahun	376.794.888.180	1 Tahun	393.669.303.494

Analisis perencanaan dan Penyaluran bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	340.069.972.700	12 Laporan	357.395.000.700
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	15.300.000.000	1 Dokumen	13.488.475.894
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	21.424.915.480	2 Laporan	22.785.826.900
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase OPD yang rekonsiliasi tepat waktu	100%	1.709.246.120	100%	1.855.366.120
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertiba dan Akuntabel	100%	1.709.246.120	100%	1.855.366.120
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	24.720.843	1 Dokumen	
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	134.024.530	2 Laporan	153.944.530
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	282.179.050	12 Laporan	306.189.050
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	410.818.613	12 Laporan	490.959.456
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	12 Dokumen	364.770.950	12 Dokumen	398.840.950

		daerah	Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	336 Laporan	113.181.530	336 Laporan	129.881.530
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	90 Orang	379.550.604	90 Orang	375.550.604
3	Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio pajak daerah terhadap PAD	51%		51%	
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase pertumbuhan WP baru dan Presentase pengurangan piutang	100%	4.867.725.507	100%	5.535.949.007
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dokumen	230.218.830	3 Dokumen	244.949.830
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	500000 Objek Pajak	1.342.901.300	500000 Objek Pajak	1.777.183.300
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	504000 Dokumen	1.458.662.700	504000 Dokumen	1.495.174.700
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	108 Dokumen	83.667.875	108 Dokumen	83.667.875

	Penagihan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	504000 Dokumen	1.327.875.552	504000 Dokumen	1.600.221.552
	Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50 Dokumen	10.734.150	50 Dokumen	10.734.150
	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	504000 Dokumen	413.665.100	504000 Dokumen	324.017.600

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai perwujudan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja tahun 2024 berdasarkan masing – masing indikator kinerja dari sasaran- sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. Selain itu, LKjIP 2024 juga menguraikan tentang penyebab ketidakberhasilan capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang tidak dapat dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui perencanaan kinerja (*performance plan*). Selanjutnya pada akhir Tahun 2024 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (*performance gap*). Selisih yang timbul akan dianalisis guna menerapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Realisasi Capaian Indikator Kinerja} = \frac{X}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala

ordinal untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *Outcome* yaitu :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.1

Pengukuran Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
>100 %	Melebihi Target
100 %	Sesuai Target
<100 %	Dibawah Target

1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	73	72,15*	98,83%
2	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan BMD	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP
3	Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	%	51%	54 %	106%

Realisasi nilai SAKIP tahun 2024 masih menggunakan nilai tahun 2023 dikarenakan proses pengukuran kinerja belum selesai.

2. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Tabel 3.2.
Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023			Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	69	70,80	102%	70	72,15	103%	73	72,15*	98,83%
2	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan BMD	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	%	44%	44%	100%	51%	53%	104%	51%	54 %	106%

Sasaran 1 : Capaian tahun 2022 untuk nilai SAKIP 70,80 dari target nilai 69, tahun 2023 untuk nilai SAKIP 72,15 melebihi target nilai 70 dengan kategori sangat baik sehingga menggambarkan bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar telah mewujudkan tata kelola Organisasi Pemerintah Daerah yang baik dan struktur organisasi yang bersih melalui transparansi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, untuk nilai SAKIP tahun 2024 masih menggunakan nilai 2023 dikarenakan proses pengukuran kinerja belum selesai.

Sasaran 2 : Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023, 2024 untuk indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah adalah WTP dengan kategori sesuai target.

Sasaran 3 : Realisasi rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah 54 % dibandingkan targetnya 51% hal tersebut menunjukkan angka yang signifikan dengan kategori melebihi target.

- MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan target Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024			Akhir Renstra	Capaian terhadap target akhir renstra 2026
				Target	Capaian	%	Target	%
1	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	73	72,15	98,83%	77	93,70
2	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan BMD	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	%	51 %	54 %	106%	52%	103%

- PERBANDINGAN REALISASI KINERJA OPINI BPK TENTANG LKPD TAHUN 2023 DAN 2024 DENGAN CAPAIAN KINERJA NASIONAL (SOLORAYA).

Capaian kinerja pada bagian ini adalah membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan pada Tahun 2023 dan 2024 dengan capaian kinerja Nasional (Soloraya), yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4.

Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Nasional

No	Kabupaten / Kota	Opini BPK atas LKPD	
		2023	2024
1	2	3	4
1	Klaten	WTP	WTP
2	Boyolali	WTP	WTP
3	Wonogiri	WTP	WTP
4	Sukoharjo	WTP	WTP
5	Karanganyar	WTP	WTP
6	Sragen	WTP	WTP
7	Solo	WTP	WTP

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat Opini atas LKPD dari Kabupaten Karanganyar untuk tahun 2023 dan 2024 sudah WTP.

Target Capaian indikator tujuan dari Tahun 2019 s.d. 2024 untuk Opini BPK atas LKPD adalah WTP, dan untuk realisasi dari tahun 2019 s.d. 2024 untuk indikator tersebut adalah WTP sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5

Target Capaian Sasaran Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMD

No	Sasaran	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian					Realisasi
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan BMD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Tabel 3.6

Analisis penyebab keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	73	72,15*	98,83%	Dibawah target	Nilai Sakip masih menggunakan penilaian tahun 2023 dikarenakan proses pengukuran kinerja belum selesai.
2	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan BMD	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	Sesuai target	-
3	Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	51 %	54 %	106%	Melebihi target	-

Berdasarkan tabel Realisasi sasaran strategis yang telah disajikan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat peningkatan kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, yaitu :

- a. Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur;
- b. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melebihi target;
- c. Optimalnya pengelolaan aset daerah;
- d. Sudah dikembangkan Sistem Informasi Pelayanan publik untuk transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah :

- a. Kualitas, kompetensi dan kapasitas SDM Aparatur pengelola keuangan, pengelola pendapatan dan aset daerah yang masih bisa dikembangkan;
- b. Adanya berbagai peraturan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pengembangan standar operasional prosedur dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyusunan anggaran, perbendaharaan, pelaporan keuangan, pengelolaan aset/ barang milik daerah;
- d. Pengembangan website Badan Keuangan Daerah sebagai wujud akuntabilitas.

6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Ukuran efektifitas pemungut pajak daerah pada dasarnya dapat digunakan untuk menganalisis efektifitas pemungutan pajak secara keseluruhan, seperti total penerimaan pajak dan total penerimaan jenis pajak.

Secara operasional efektifitas pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus *Tax Performance Index*(TPI), yakni hasil bagi antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. TPI ini kami asumsikan sebagai capaian penerimaan Pajak Daerah karena rumus yang digunakan adalah sama (sebagaimana tertera pada Indikator Kinerja Utama BKD Kabupaten Karanganyar). Semakin besarnya angka TPI menunjukkan semakin efektifnya pemungutan pajak dikaitkan dengan sasaran atau target yang akan diperoleh. Dengan rumus TPI dapat dihitung efektifitas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar yaitu target Rp 217.700.930.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 245.820.209.492,00 dengan prosentase sebesar 113 % (melebihi target).

7. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Laporan Realisasi Kinerja adalah tindakan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi kinerja dapat diukur dengan membandingkan capaian kinerja dengan rencana kerja yang sudah ditetapkan. Sebagaimana disusun dalam tabel seperti di bawah ini:

Tabel 3.7
Laporan Realisasi Kinerja
Badan Keuangan Daerah
Per 31 Desember 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Presentase	100	100	100
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Presentase	100	100	100
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	12	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Presentase	100	100	100
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	68	68	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase	100	100	100
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	136	136	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase	100	100	100
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	100
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	24	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	120	100
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	21796	21796	100
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	10	10	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase	100	100	100		

		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	8	8	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase	100	100	100
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan daerah	Presentase	100	100	100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	78	78	100
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	413	413	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit	1	1	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit	12	12	100
2	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan BMD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Presentase ketepatan APBD, presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah dan presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku	Presentase	100	100	100
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Presentase ketepatan APBD	Presentase	100	100	100
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	5	5	100
		Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	4	4	100
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	OPD	42	42	100
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	OPD	42	42	100

	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	3	3	100
	Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	3	3	100
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	2	2	100
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	4	4	100
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku	Presentase	100	100	100
	Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	84	84	100
	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan transfer lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	12	12	100
	Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non-tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	12	12	100
	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kasda laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	12	12	100
	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	4	4	100
	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	12	12	100

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	1	100
Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	100	100	100
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah	Presentase	100	100	100
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	22	22	100
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Dokumen	18	18	100
Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	6	6	100
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	1	100
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	100
Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemda	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	100
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	90	90	100
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertib dan Akuntabel	Tahun	1	1	100
Analisis perencanaan dan Penyaluran bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	12	12	100
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1	100
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	2	2	100

		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase OPD yang rekonsiliasi tepat waktu	Presentase	100	100	100
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertiba dan Akuntabel	Presentase	100	100	100
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	12	12	100
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	12	12	100
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	12	12	100
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	336	336	100
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	90	90	100
3	Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio pajak daerah terhadap PAD	Presentase	51	54	106
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase pertumbuhan WP baru dan Presentase pengurangan piutang	Presentase	100	100	100
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	3	3	100
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	500000	500000	100
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	504000	504000	100
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	108	108	100
		Penagihan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	504000	504000	100
		Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	50	50	100
		Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	504000	504000	100

3.2 REALISASI ANGGARAN

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh

terhadap perwujudan sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan membandingkan capaian 2023 dengan capaian 2024, serta mengaitkannya dengan kemungkinan tercapainya sasaran tahun terakhir Renstra Tahun 2024 – 2026.

Analisis tentang realisasi sasaran strategis yang ditetapkan oleh BKD Kabupaten Karanganyar sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada Renstra, disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.8

Ringkasan Capaian Anggaran Sasaran 1

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	TARGET 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)
1	Nilai SAKIP OPD	75.820.514.590	66.028.025.146	76.364.117.355	63.988.882.371

Program pendukung sasaran 1 yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran kegiatan Rp 76.364.117.355,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 63.988.882.371,00 dengan persentase realisasi anggaran 83,8 % realiasi tersebut turun dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 87%;

Tabel 3.9

Ringkasan Capaian Anggaran Sasaran 2

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024
1.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	377.181.826.380	375.270.698.576	399.520.511.308	387.878.616.855

Dari tabel 3.6 dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran 2 Tahun 2024 adalah 97,09 % realisasi tersebut naik dari realisasi tahun 2023 yaitu sebesar 93,30 %.

Program pendukung sasaran 2 yaitu :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran kegiatan Rp 377.181.826.380,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 375.270.698.576,00 dengan persentase realisasi anggaran 97,1 %;

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan anggaran kegiatan Rp 1.855.366.120,00 dan realiasasi anggaran sebesar Rp 1.750.059.086,00 dengan presentase realisasi anggaran 94,3 %.

Tabel 3.10
Ringkasan Capaian Anggaran Sasaran 3

Sasaran 3 : Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah hal ini bisa dijelaskan dengan tabel sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024
1.	Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	6.061.588.000	5.625.832.038	5.535.949.007	5.363.336.799

Dari tabel 3.10 dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran 3 Tahun 2024 adalah 96,9 % realisasi tersebut naik dari realisasi tahun 2023 yaitu sebesar 92,8%.

Program pendukung sasaran 3 yaitu :

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran kegiatan Rp 5.535.949.007,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 5.363.336.799,00 dengan persentase realisasi anggaran 96,9 %;

Secara keseluruhan untuk target anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 adalah Rp 481.420.577.670,00 dengan realisasi anggaran Rp 457.230.836.025,00 Presentase Realisasi Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 secara keseluruhan dengan capaian realisasi anggaran 95 %.

Tabel 3.11.
Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Dengan Tahun Sebelumnya

Tahun 2023			Tahun 2024		
Anggaran (Rp)	Realiasai (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realiasai (Rp)	Capaian (%)
460.962.826.570	449.744.238.665	97,57 %	481.420.577.670	457.230.836.025	95 %

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Badan Keuangan Daerah Per 31 Desember 2024

SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
			Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan		Nilai SAKIP OPD	481.420.577.670	457.230.836.025	95,0
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	76.364.117.355	63.988.882.371	83,8

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan anggaran kegiatan Rp 1.855.366.120,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.750.059.086,00 dengan presentase realisasi anggaran 94,3 %.

Tabel 3.10
Ringkasan Capaian Anggaran Sasaran 3

Sasaran 3 : Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah hal ini bisa dijelaskan dengan tabel sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024
1.	Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	6.061.588.000	5.625.832.038	5.535.949.007	5.363.336.799

Dari tabel 3.10 dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran 3 Tahun 2024 adalah 96,9 % realisasi tersebut naik dari realisasi tahun 2023 yaitu sebesar 92,8%.

Program pendukung sasaran 3 yaitu :

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran kegiatan Rp 5.535.949.007,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 5.363.336.799,00 dengan persentase realisasi anggaran 96,9 %;

Secara keseluruhan untuk target anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 adalah Rp 481.420.577.670,00 dengan realisasi anggaran Rp 457.230.836.025,00 Presentase Realisasi Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 secara keseluruhan dengan capaian realisasi anggaran 95 %.

Tabel 3.11.
Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Dengan Tahun Sebelumnya

Tahun 2023			Tahun 2024		
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
460.962.826.570	449.744.238.665	97,57 %	481.420.577.670	457.230.836.025	95 %

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Badan Keuangan Daerah Per 31 Desember 2024

SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
			Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan		Nilai SAKIP OPD	481.420.577.670	457.230.836.025	95,0
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	76.364.117.355	63.988.882.371	83,8

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	680.000.000	628.700.000	92,5
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.587.427.588	38.923.997.920	98,3
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	259.462.000	259.461.650	100,0
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37.508.277.500	37.034.301.780	98,7
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100.111.953	99.638.540	99,5
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.719.576.135	1.530.595.950	89,0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan daerah	1.424.708.100	1.390.577.038	97,6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	427.224.000	422.403.000	98,9
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	659.484.100	633.838.038	96,1
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	198.000.000	196.211.000	99,1
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100.000.000	98.125.000	98,1
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40.000.000	40.000.000	100,0
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan BMD	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	399.520.511.308	387.878.616.855	95,7

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Presentase ketepatan APBD, presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah dan presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku	397.665.145.188	386.128.557.769	97,1
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Presentase ketepatan APBD	1.370.518.775	1.348.473.530	98,4
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	147.442.500	143.723.500	97,5
Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	102.959.000	101.759.100	98,8
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	18.917.600	18.841.600	99,6
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	19.811.450	18.181.850	91,8
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	233.597.900	229.557.250	98,3
Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	253.953.600	250.019.200	98,5
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	78.864.600	78.532.600	99,6
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	514.972.125	507.858.430	98,6
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku	1.301.423.800	1.169.380.150	89,9
Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	95.205.800	77.046.250	80,9
Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan transfer lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6.584.000	5.258.000	79,9

Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non-tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	7.118.000	5.985.000	84,1
Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas dan laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	724.112.000	662.996.000	91,6
Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5.068.000	4.250.000	83,9
Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	160.000.000	147.736.000	92,3
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	19.589.000	18.206.000	92,9
Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	283.747.000	247.902.900	87,4

Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non-tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	7.118.000	5.985.000	84,1
Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kasda laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	724.112.000	662.996.000	91,6
Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5.068.000	4.250.000	83,9
Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	160.000.000	147.736.000	92,3
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	19.589.000	18.206.000	92,9
Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	283.747.000	247.902.900	87,4

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah	1.323.899.119	1.317.710.397	99,5
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	66.284.400	66.238.400	99,9
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	8.669.000	8.669.000	100,0
Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	679.519.250	676.511.597	99,6
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6.443.500	6.443.500	100,0
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	5.125.069	5.125.000	100,0
Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemda	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	3.850.000	3.850.000	100,0
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	554.017.900	550.872.900	99,4
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertib dan Akuntabel	393.669.303.494	382.292.993.692	97,1
Analisis perencanaan dan Penyaluran bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuang	357.395.000.700	357.320.000.700	100,0
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	13.488.475.894	2.187.166.092	16,2
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil	22.785.826.900	22.785.826.900	100,0

	Kabupaten/Kota			
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase OPD yang rekonsiliasi tepat waktu	1.855.366.120	1.750.059.086	94,3
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertiba dan Akuntabel	1.855.366.120	1.750.059.086	94,3
Pentausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pentausahaan Barang Milik Daerah	153.944.530	151.214.400	98,2
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	306.189.050	290.736.650	95,0
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	490.959.456	454.523.139	92,6
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	398.840.950	385.048.247	96,5
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	129.881.530	100.066.150	77,0
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	375.550.604	368.470.500	98,1
Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan daerah	Rasio pajak daerah terhadap PAD	5.535.949.007	5.363.336.799	96,9
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase pertumbuhan WP baru dan Presentase pengurangan piutang	5.535.949.007	5.363.336.799	96,9
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		5.535.949.007	5.363.336.799	96,9
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	244.949.830	238.872.650	97,5
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1.777.183.300	1.751.240.380	98,5
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1.495.174.700	1.453.217.400	97,2

Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	83.667.875	82.926.875	99,1
Penagihan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1.600.221.552	1.553.062.644	97,1
Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10.734.150	7.635.450	71,1
Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	324.017.600	276.381.400	85,3

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah / LKjIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar disusun sebagai sarana untuk melaporkan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar kepada Bupati Karanganyar. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sesuai dengan kenyataan / hasil dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan berdasarkan pada program kerja yang telah ditetapkan, yang mengacu pada Program Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang dihadapi maka kegiatan yang dilaksanakan mengarah pada terlaksananya program serta terselenggaranya sasaran untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja pada Badan Keuangan Daerah maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan dengan indikator nilai SAKIP dari target 73 tercapai 72,15 dengan kategori di bawah target dikarenakan masih menggunakan realisasi tahun 2023 karena proses pengukuran kinerja belum selesai;
2. Sasaran Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan BMD dengan indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah, dari target WTP tercapai WTP dengan kategori sesuai target;
3. Sasaran Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan indikator Rasio Pajak Daerah terhadap PAD dari target 51 % tercapai 54% dengan kategori melebihi target.

B. Saran

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala, beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2024, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur;
2. Ketepatan penyerapan anggaran daerah di seluruh OPD sebagai salah satu unsur penialain evaluasi kinerja OPD yang diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar;
3. Evaluasi dan pengawasan terhadap pihak terkait;
4. Ekstensifikasi dan instensifikasi pajak dan retribusi daerah;
5. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat;
6. Pengadaan sarana dan prasarana untuk keperluan operasional kantor;
7. Peningkatan integritas ASN.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 diharapkan akan menjadi tolok ukur kinerja dalam melaksanakan anggaran kegiatan yang menjadi tanggung jawab Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar di tahun yang akan datang.

Plh. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



PUJIYANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197105151990031002